



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/ 462/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah harus menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

KABAG	KASUBBAG / FUNGSIONALS
↓	8

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 651);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/480/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028.

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

- KEDUA** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai panduan dalam penerapan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- KETIGA** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- BAB I PENDAHULUAN;**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Ruang Lingkup
- BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE;**
- 2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gunung Mas
 - 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Gunung Mas
 - 2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE
- BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KAB. GUNUNG MAS;**
- 3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2023
 - 3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE
 - 3.3. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE KAB. GUNUNG MAS;**
- 4.1. Target Indeks SPBE
 - 4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE
- BAB V ANALISIS KESENJANGAN;**
- 5.1. Domain Kebijakan
 - 5.2. Domain Tata Kelola
 - 5.3. Domain Manajemen SPBE
 - 5.4. Domain Layanan
- BAB VI PETA RENCANA SPBE KAB. GUNUNG MAS;**
- 6.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas (2024 – 2028)
 - 6.2. Percepatan Penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas
- BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI; dan**
BAB VIII PENUTUP.
- KELIMA** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dengan memperhatikan :
- a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

KABAG	KASUBBAG / F FUNGSIONAL SE
↓	2

- d. perubahan RPJMD;
- e. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
- f. ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 30 September 2024



Pj. **BUPATI GUNUNG MAS,**

HERSON B. ADEN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.



PETA RENCANA SPBE

KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2024 - 2028

KATA PENGANTAR

Dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gunung Mas ini disusun sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan SPBE di wilayah Kabupaten Gunung Mas untuk lima tahun ke depan (2024-2028). Dalam penyusunannya, Peta Rencana SPBE ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022 tentang “Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 – 2028 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen peta rencana ini merupakan dokumen yang dinamis dan fleksibel, oleh karenanya dokumen ini harus senantiasa direviu, dievaluasi dan diselaraskan agar dapat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat serta mampu beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan internal maupun nasional.

Semoga dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas 2024-2028 ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan serta mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, terbuka, inovatif, dan akuntabel.

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

HERSON B. ADEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1. Maksud.....	3
1.3.2. Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup.....	4
1.4.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE	4
1.4.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS	4
1.4.3. Bab 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS	4
1.4.6. Bab 5: ANALISIS KESENJANGAN	4
1.4.7. Bab 6: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS.....	4
1.4.5. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI.....	4
1.4.6. Bab 8: PENUTUP	4
BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE	5
2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gunung Mas	5
2.1.1. Visi SPBE	5
2.1.2. Misi SPBE.....	5
2.1.3. Tujuan SPBE	6
2.1.4. Sasaran SPBE.....	6
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Gunung Mas.....	6
2.2.1. Tata Kelola SPBE	6
2.2.2. Layanan SPBE	7
2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	8
2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE	9
2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE	10

BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS.....	14
3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2023	14
3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE.....	15
3.2.1. Struktur Organisasi	17
3.2.2. Kebijakan	19
3.2.3. Tata Kelola TIK.....	20
3.2.4. Infrastruktur TIK	22
3.3. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas.....	26
3.3.1. Visi	26
3.3.2. Misi	26
BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS	28
4.1. Target Indeks SPBE	28
4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE	29
4.2.1. Tata Kelola SPBE	30
4.2.2. Layanan SPBE	33
4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	35
4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE	39
BAB V ANALISIS KESENJANGAN	41
5.1. Domain Kebijakan	41
5.2. Domain Tata Kelola	41
5.3. Domain Manajemen SPBE.....	42
5.4. Domain Layanan	43
BAB VI PETA RENCANA SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS	44
6.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas (2024 – 2028)	46
6.2. Percepatan Penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas.....	57
BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI.....	58
Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Gunung Mas	58
Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Gunung Mas	59
Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Gunung Mas.....	60

Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Gunung Mas	61
Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas	62
Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Gunung Mas	63
Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas	64
Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas	65
Program 3.2. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	66
Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	67
Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD	68
Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	69
Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK.....	70
Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	71
Program 3.8. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra	72
Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.....	73
Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi.....	74
Program 3.11. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi	75
Program 3.12. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK.....	76
Program 3.13. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	77
Program 3.14. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	78

Program 3.15. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik.....	79
Program 3.16. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian	80
Program 3.17. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Perencanaan dan Penganggaran.....	81
Program 3.18. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah.....	82
Program 3.19. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja	83
Program 3.20. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan.....	84
Program 3.21. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik.....	85
Program 3.22. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	86
Program 3.23. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	87
Program 3.24. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah	88
Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	89
Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	90
Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	91
Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan.....	92
Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan.....	93
Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan	94
Program 4.7. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	95
Program 4.8. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE.....	96
Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Gunung Mas	97
Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan	98
Program 6.1. Pengembangan Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas	98
Program 6.2. Pengembangan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas	99

Program 6.3. Pengembangan Portal Informasi Pendukung <i>Smart City</i> (<i>Smart Agro, Smart Human Resource dan Smart Tourism</i>).....	100
Program 7.1. Pengembangan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi).....	101
Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian	102
Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan	103
Program 7.4. Pengembangan Integrasi Pengaduan Publik.....	104
Program 7.5. Pengembangan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	105
Program 8.2. Pembentukan portal pusat layanan Internal (<i>Service Desk</i>)	106
Program 9.1. Pengembangan Pusat Data Dengan Standar Internasional <i>Data Center</i>	107
Program 10.1. Mengembangkan Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar OPD.....	108
Program 10.2. Mengembangkan Infrastruktur TIK Pendukung <i>Smart Agro,</i> <i>Smart Human Resource dan Smart Tourism</i>	109
Program 11.1. Membentuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.....	110
Program 12.1. Penyediaan Bandwidth Yang Memadai Untuk Tiap OPD Dan Koneksi Internet di Masyarakat.....	111
Program 13.1. Penyediaan Layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Gunung Mas	111
Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Gunung Mas	112
Program 15.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi	113
Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.....	114
Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	114
Program 16.2. Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	115
Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE.....	115
Program 18.1. Pembentukan Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE.....	116
Program 18.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	116
Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE	117
BAB VIII PENUTUP	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan antara Misi Pembangunan, <i>Smart Agro</i> , <i>Smart Human Resources</i> , dan <i>Smart Tourism</i>	27
Gambar 2. Inisiatif Strategis	30
Gambar 3. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE	44
Gambar 4. Program Percepatan SPBE	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2023.....	10
Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2024.....	11
Tabel 3. Kategori Nilai Indeks SPBE	12
Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan...12	
Tabel 5. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE.....	13
Tabel 6. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023	14
Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE	15
Tabel 8. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas	17
Tabel 9. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK.....	20
Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Gunung Mas	21
Tabel 11. Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.....	22
Tabel 12. Daftar Website Kabupaten Gunung Mas	24
Tabel 13. Target Pengembangan Indeks SPBE.....	28
Tabel 14. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan	41
Tabel 15. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola	42
Tabel 16. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE	42
Tabel 17. Analisis Kesenjangan Domain Layanan	43
Tabel 18. Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas (2024 – 2028)	46

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 100.3.3.2/ /2024

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menyebabkan orang dapat berinteraksi langsung tanpa perantara, kemudahan dalam mengakses data dan informasi, sehingga tuntutan masyarakat akan layanan yang mudah, murah, cepat dan bagus karena adanya teknologi menjadi multak. Masyarakat dengan mudah membandingkan suatu layanan dari negara lain atau institusi lain, masyarakat dengan mudah berkomentar di sosial media jika ada layanan yang kurang bagus dan menjadi viral. Tentu saja dampak teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa saat ini harus bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri seperti media informasi, model pendidikan serta kesehatan karena adanya teknologi ini.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu *digital marketplace*. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah :

1. Globalisasi yang menuntut pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini
2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah
3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres

ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE *Framework*);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE *Roadmap*);
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE *Implementation plan*);

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gunung Mas yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Gunung Mas;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Gunung Mas;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan Keamanan Sistem Informasi SPBE;

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

1.4.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2024 - 2028 Kabupaten Gunung Mas

1.4.3. Bab 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 – 2028, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas.

1.4.6. Bab 5: ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas

1.4.7. Bab 6: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas selama 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.

1.4.5. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

1.4.6. Bab 8: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gunung Mas

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (integrated Government)*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Gunung Mas selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Gunung Mas dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Gunung Mas adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Gunung Mas adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Gunung Mas

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

2.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Gunung Mas.
 - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Gunung Mas perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

- b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Gunung Mas adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas.
- 2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
 - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2.2.2. Layanan SPBE

- 1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
- 2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

- a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 - 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
 - mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 - terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas.
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik).
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
 - 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya

- pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
- b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas:
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar

pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
- 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13%

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%
Domain 3 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Pada tahun 2024, bobot penilaian Indeks SPBE tidak mengalami perubahan, seperti ditunjukkan oleh tabel 2 berikut.

Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%
Domain 3 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategori Nilai Indeks SPBE

NO	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3 – Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola

Tingkat (Level)	Karakteristik
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 5 berikut.

Tabel 5. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

BAB III

KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2023

Kementerian PANRB pada tahun 2023 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Gunung Mas yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar **2,31**. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

Domain	Aspek	Indeks
Kebijakan		1,50
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,50
Tata Kelola		1,20
	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
	Penyelenggara SPBE	1,00
Manajemen		1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
Layanan		3,63
	Layanan Administrasi Pemerintah	3,60
	Layanan Publik	3,67
INDEKS SPBE		2,31

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas untuk **Domain Kebijakan** dalam kategori **Kurang**. Penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen memiliki level **Rintisan**, yang berarti Kebijakan internal Tata Kelola dan Manajemen belum tersedia atau masih berbentuk konsep.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Gunung Mas untuk domain Tata Kelola, masuk dalam kategori **Kurang**. Aspek Tata Kelola Kelembagaan dalam level **Terkelola**, yang berarti

proses tata kelola kelembagaan dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Aspek Strategi Perencanaan, dan TIK masuk dalam level **Rintisan**, yang berarti proses tata kelola kelembagaan dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Gunung Mas untuk Domain Layanan, masuk dalam Kategori **Baik**. Aspek Layanan Administrasi dan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam **Level Interaksi**, yang berarti layanan SPBE yang berikan dalam bentuk informasi dua arah.

3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 20 program strategis seperti yang ditunjukkan tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan 17 Kebijakan SPBE (Perbup/Perwali/SK/SE)	Sebagian sudah ada	
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	Sebagian sudah ada	
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Proses pembuatan	
4	Membuat Arsitektur SPBE (6 Arsitektur SPBE)	Belum Ada	
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksi nya	Sudah Ada	Belum bekerja optimal
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update indeks SPBE)	Belum setiap Tahun	1 kali di tahun 2018
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data /Server Room /DRC	Belum Optimal	Masih perlu ditingkatkan optimalisasi penggunaan Data Center
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro / VPN / Backbone FO	Sudah ada	Perlu dikembangkan lagi untuk menghubungkan semua Kecamatan
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	Sebagian sudah ada	Dinas Pendapatan sudah ada API ke

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
			bank untuk aplikasi perpajakan
10	Integrasi Layanan Elektronik(Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Sudah ada	Perencanaan & Anggaran sudah terintegrasi Kearsipan belum terintegrasi, Pengaduan Publik: SPAN lapor, Kepegawaian: belum terintegrasi
11	Membangun Portal Data	Pengembangan	Sudah dikembangkan belum dilaunching
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / SNI 27001	Belum dilakukan	
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum Ada	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Belum rutin	
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE (Antar OPD /Antar Kabupaten)	Belum Ada	
16	Membentuk SDM TIK	Sudah ada	Masih kurang
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Belum Ada	
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Belum Ada	
19	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Sudah Ada	
20	Membuat Call Center Layanan	Belum ada	

3.2.1. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh tabel 8 berikut.

Tabel 8. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
12	Dinas Kesehatan (DINKES)
13	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK)
14	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan
15	Dinas Pekerjaan Umum
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
18	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (DISDIKPORA)
19	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Dinas Pertanian
24	Dinas Sosial
25	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM
26	Satuan Polisi Pamong Praja
27	Kecamatan Damang Batu
28	Kecamatan Kahayan Hulu Utara

No	Organisasi Perangkat Daerah
29	Kecamatan Kurun
30	Kecamatan Manuhing
31	Kecamatan Manuhing Raya
32	Kecamatan Mihing Raya
33	Kecamatan Miri Manasa
34	Kecamatan Rungan Barat
35	Kecamatan Rungan Hulu
36	Kecamatan Rungan
37	Kecamatan Sepang
38	Kecamatan Tewah

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Gunung Mas digerakkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Gunung Mas.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain:

1. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
3. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
4. Pelayanan informasi publik;
5. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
6. Pelayanan infrastruktur dasar pusat data (data center), layanan akses internet dan intranet;
7. Pelayanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah (*e-government*);
8. Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
9. Pelayanan keamanan informasi elektronik pemerintahan (*e-government*);
10. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;

11. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
12. Penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik;
13. Pengintegrasian pengolahan data statistik dan tata kelola persandian;
14. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
15. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup Kabupaten;
16. Pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
17. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik,
 - b. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
 - c. Bidang E-Government,
 - d. Bidang Persandian
 - e. Bidang Statistik
4. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3.2.2. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, seperti ditunjukkan tabel 9.

Tabel 9. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK

No	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Jenis kebijakan
1	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2023	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Peraturan Bupati
2	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019	Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati
3	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019	Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Elektronik	Peraturan Bupati

Kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

3.2.3. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam 3 perspektif, yaitu:

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfosantik); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Gunung Mas

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Perencanaan (Adanya Masterplan TIK)	Proses pembuatan Peta Rencana SPBE	
2	Pengembangan		
	a) Pengembangan Infrastruktur Data Center	Sudah ada Room Server	
	b) Pengembangan Jaringan OPD	Sudah ada	Belum semua OPD sudah terhubung jaringan intranet antar OPD (berupa Kecamatan yang berada di luar wilayah Kurun)
	c) Pengembangan Aplikasi	Sudah ada	Beberapa pengembangan dilakukan oleh Diskominfoantik, aplikasi lain masih dikembangkan OPD masing2
	d) Proses Penganggaran tahunan	Sudah dilakukan	Masih kurang untuk TIK
	e) Pengembangan SDM TIK	Ada anggaran pengembangan SDM TIK	Masih kurang
3	Operasional		
	a) Berfungsinya Operator TIK OPD	Belum ada	Sudah ada operator Web site OPD
	b) Adanya Pusat Service Desk (<i>Single point of contact</i>)	Belum Ada	
	c) Adanya Daftar Layanan TIK	Sudah ada	
	d) Adanya SLA Layanan TIK	Belum ada	
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Belum pernah	
5	Tupoksi Dinas Kominfosantik yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfosantik	Sudah ada	Infrastruktur TIK cukup optimal Layanan lain belum optimal
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (Belum ada	

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
	apakah sudah ada atau belum)		

3.2.4. Infrastruktur TIK

3.2.4.1. Infrastruktur Jaringan

Hampir seluruh OPD sudah terhubung dengan Fiber Optik dengan sentral jaringan intranet di Dinas Kominfoantik. Seluruh OPD Kecamatan saat ini belum terhubung jaringan intranet antar OPD. Namun sudah memiliki akses koneksi jaringan internet diadakan secara mandiri oleh masing-masing kecamatan.

Jaringan internet sudah dikelola terpusat oleh Dinas Kominfoantik dengan total bandwidth 250MBps yang dibagi ke masing-masing OPD yang terhubung ke jaringan intranet antar OPD.

3.2.4.2. Aplikasi dan Website

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Gunung Mas seperti ditunjukkan tabel 11 dan tabel 12.

Tabel 11. Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

NO	NAMA APLIKASI DAERAH	ALAMAT APLIKASI
1	Aplikasi Penanaman Modal	penanaman-modal.gunungmaskab.go.id
2	Aplikasi Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi Dan Koperasi	dotanpemkop.gunungmaskab.go.id
3	Sistem Informasi Agenda Pemerintah Daerah	agenda.gunungmaskab.go.id
4	Ijin Penelitian Online Bappedalitbang	aipon.gunungmaskab.go.id
5	Elektronik Produk Hukum Sekretariat Daerah	e-prokumda.gunungmaskab.go.id
6	Dokumen Perencanaan Elektronik Bappedalitbang	edompet.gunungmaskab.go.id
7	Aplikasi Indek Kepuasan Masyarakat	ikm.gunungmaskab.go.id
8	Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	lpse.gunungmaskab.go.id
9	Sistem Informasi Anggaran Daerah	siganda.gunungmaskab.go.id

NO	NAMA APLIKASI DAERAH	ALAMAT APLIKASI
10	Sistem Informasi Perkantoran Maya	simaya.gunungmaskab.go.id
11	Sistem Informasi Pemantauan Pajak Bumi & Bangunan	simpanpbb.gunungmaskab.go.id
12	Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah	sipad.gunungmaskab.go.id
13	Sistem Informasi Produk Usaha Perdesaan	sipudmas.gunungmaskab.go.id
14	Sistem Informasi Revisi Anggaran Bappedalitbang	sireva.gunungmaskab.go.id
15	Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi RSUD	sismadak.gunungmaskab.go.id
16	Sistem Informasi Data Kerusakan Jalan DPU	sisruja.gunungmaskab.go.id
17	Blud Rumah Sakit Umum Kuala Kurun	bludrsud.gunungmaskab.go.id
18	Kelurahan Tampang Tumbang Anjir	keltta.gunungmaskab.go.id
19	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gunung Mas	dekranasda.gunungmaskab.go.id
20	Helpdesk LPSE	helpdesk.lpse.gunungmaskab.go.id
21	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Gunung Mas	jdih.gunungmaskab.go.id
22	Kejaksaan Negeri	kejari.gunungmaskab.go.id
23	Lembaga Penyiaran Publik Daerah	lppd.gunungmaskab.go.id
24	Multi Media Center Kabupaten Gunung Mas	mmc.gunungmaskab.go.id
25	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	pkk.gunungmaskab.go.id
26	Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunung Mas	pmi.gunungmaskab.go.id

NO	NAMA APLIKASI DAERAH	ALAMAT APLIKASI
27	Radio Hamauh 98.7 Fm Kabupaten Gunung Mas	radiohamauh.gunungmaskab.go.id
28	Rumah Pintar KPU Kabupaten Gunung Mas	rumahpintarkpu.gunungmaskab.go.id
29	Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Gunung Mas	sidat.gunungmaskab.go.id
30	Informasi Elektronik Government Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	egov.gunungmaskab.go.id

Tabel 12. Daftar Website Kabupaten Gunung Mas

NO	Nama Perangkat Daerah	ALAMAT WEBSITE
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.gunungmaskab.go.id
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	kesbangpol.gunungmaskab.go.id
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	bkad.gunungmaskab.go.id
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.gunungmaskab.go.id
5	Badan Pendapatan Daerah	bpprd.gunungmaskab.go.id
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	bapperida.gunungmaskab.go.id
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	dkp.gunungmaskab.go.id
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.gunungmaskab.go.id
9	Dinas Kesehatan	dinkes.gunungmaskab.go.id
10	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik	diskominfo.gunungmaskab.go.id
11	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan	dlh.gunungmaskab.go.id
12	Dinas Pekerjaan Umum	dpu.gunungmaskab.go.id
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.gunungmaskab.go.id

NO	Nama Perangkat Daerah	ALAMAT WEBSITE
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpmsp.gunungmaskab.go.id
15	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	disdikpora.gunungmaskab.go.id
16	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	disdaldukkb.gunungmaskab.go.id
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	perikanan.gunungmaskab.go.id
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	dinperindag.gunungmaskab.go.id
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpusarsip.gunungmaskab.go.id
20	Dinas Pertanian	dpkp.gunungmaskab.go.id
21	Dinas Sosial	dinsos.gunungmaskab.go.id
22	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Koperasi UKM	distranskerukm.gunungmaskab.go.id
23	Inspektorat	inspektorat.gunungmaskab.go.id
24	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.gunungmaskab.go.id
25	Sekretariat Daerah	setda.gunungmaskab.go.id
26	Sekretariat DPRD	setwan.gunungmaskab.go.id
27	Kecamatan Damang Batu	damangbatu.gunungmaskab.go.id
28	Kecamatan Kahayan Hulu Utara	kahayanhuluutara.gunungmaskab.go.id
29	Kecamatan Kurun	kurun.gunungmaskab.go.id
30	Kecamatan Manuhing	manuhing.gunungmaskab.go.id
31	Kecamatan Manuhing Raya	manuhingraya.gunungmaskab.go.id
32	Kecamatan Mihing Raya	mihingraya.gunungmaskab.go.id
33	Kecamatan Miri Manasa	mirimanasa.gunungmaskab.go.id
34	Kecamatan Rungan Barat	runganbarat.gunungmaskab.go.id
35	Kecamatan Rungan Hulu	runganhulu.gunungmaskab.go.id
36	Kecamatan Rungan	rungan.gunungmaskab.go.id
37	Kecamatan Sepang	sepang.gunungmaskab.go.id
38	Kecamatan Tewah	tewah.gunungmaskab.go.id

3.3. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas

3.3.1. Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama)”

3.3.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Gunung Mas tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional;
2. Misi-2: Meningkatkan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Misi-3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
4. Misi-4: Mempercepat reformasi birokrasi
5. Misi-5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (*Law Enforcement*)
6. Misi-6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
7. Misi-7: Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
8. Misi-8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Dengan melihat perkembangan, kondisi Kabupaten Gunung Mas, potensi unggulan daerah, dan merujuk pada adanya konsep SMART CITY maka terdapat 3 konsep pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang akan dilakukan yaitu:

1. SMART AGRO

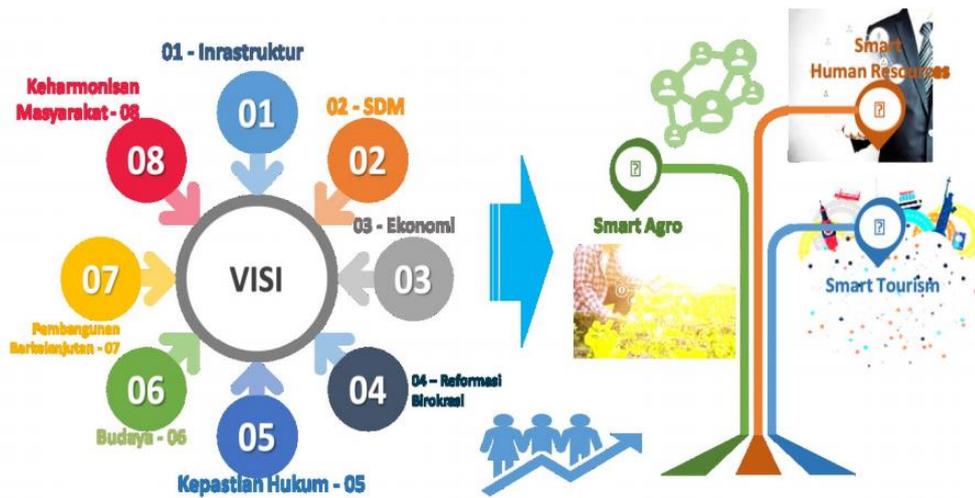
Smart agro merupakan pengembangan dalam bidang pertanian dari konvensional menjadi lebih modern. Dengan hadirnya teknologi dalam dunia pertanian, diharapkan pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat lebih produktif.

2. SMART HUMAN RESOURCES

Kualitas SDM merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam pembangunan daerah, kualitas SDM yang berdaya saing mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya pengelolaan sumber daya (tenaga kerja) yang dikembangkan dalam sistem yang SMART. Dengan smart human resources diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dengan smart human resources diharapkan mampu mendesign sebuah sistem Human Resources yang dapat diaplikasikan dalam industri-industri yang sedang berkembang.

3. SMART TOURISM

Dengan adanya perkembangan IT yang sangat cepat maka hal ini harus mampu dimanfaatkan juga dalam pengembangan potensi-potensi pariwisata daerah. Dalam industri pariwisata telah menciptakan lingkungan baru dalam dunia pariwisata platform pariwisata ICT terintegrasi. Platform tersebut mengintegrasikan peran teknologi informasi dalam memberikan informasi dan layanan yang efisien untuk wisatawan.



Gambar 1. Keterkaitan antara Misi Pembangunan, Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS

4.1. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Gunung Mas berperan sebagai “IT” nya Kabupaten Gunung Mas. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfosantik adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *handling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas selaras dengan rencana strategis **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2024 – 2028 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai **2,14 (Cukup)** menjadi **5,0 (Memuaskan)**.

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat di tabel 13 berikut.

Tabel 13. Target Pengembangan Indeks SPBE

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2023	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2028	Uraian Target
Kebijakan	1,50	5,0	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola • Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,50	5,0	

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2023	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2028	Uraian Target
Tata Kelola	1,20	5,0	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
Perencanaan Strategis SPBE	1,50	5,0	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50	5,0	
Penyelenggara SPBE	1,00	5,0	
Manajemen	1,00	5,0	<ul style="list-style-type: none"> Proses manajemen SPBE dan Audit TIK dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	5,0	
Audit TIK	1,00	5,0	
Layanan	3,63	5,0	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal
Layanan Administrasi Pemerintahan	3,60	5,0	
Layanan Publik	3,67	5,0	
INDEK SPBE	2,31	5,0	Memuaskan

4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat di gambar 3, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE;
- Layanan SPBE;
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE • Arsitektur SPBE • Kebijakan SPBE • Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey Pengguna SPBE • Portal Pelayanan Publik • Portal Administrasi Pemerintahan • Managemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data • Jaringan Intra • Sistem Penghubung • Layanan Berbagi Pakai • Portal Data • Sistem Keamanan Informasi • Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Literasi • Kapasitas ASN • Forum Kolaborasi SPBE

Gambar 2. Inisiatif Strategis

4.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD;
- b. Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

- a. **Manajemen Risiko SPBE**
Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- b. **Manajemen Keamanan Informasi**
Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- c. **Manajemen Data**
Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
- d. **Manajemen Aset TIK**
Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- e. **Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE**

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan

SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Gunung Mas;

- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Gunung Mas dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survey Pengguna SPBE
 - a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
 - b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
 - c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Gunung Mas.
2. Portal Layanan Publik Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
 - b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Gunung Mas yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis

mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;

- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Gunung Mas diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
 - f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
 - g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
 - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;

- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
 - b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
 - c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
 - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
 - d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfosantik yang memenuhi standar Pusat Data;
 - d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.
2. Penyediaan Jaringan Intra
- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
 - b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
 - c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
 - 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 - 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi tersebut; dan
 - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).
3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
 - b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;
 - d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
4. Penyediaan akses Layanan SPBE
- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;
 - b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
 - c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;
 - d. Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Mas menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Gunung Mas yang belum terjangkau.
5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakai kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
 - b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan

SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;

- c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
 - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
6. Pembangunan Portal Data Daerah
- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
 - c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*)

- sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi;
dan
- 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan
 - a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
 - b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
 - c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;
 - d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE
 - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
 - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
 - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
 - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;

- b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola renumerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
 - a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - 3) peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
 - c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB V

ANALISIS KESENJANGAN

5.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (Standar Operational Procedure) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Tabel 14. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Sebagian ada dan belum optimal dilaksanakan	Seluruhnya Ada dan dilaksanakan	Perlu Dibuat dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum ada dan belum dilaksanakan	Ada dan dilaksanakan	Perlu Dibuat dan disosialisasikan

5.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, *stakeholder*, perencanaan dan *enabler* (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tabel 15. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum optimalnya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada belum optimal difungsikan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dibangun, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

5.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh tabel 16 berikut.

Tabel 16. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum seluruhnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala
2	Audit TIK	Belum dilaksanakan	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

5.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 17. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

BAB VI

PETA RENCANA SPBE KABUPATEN GUNUNG MAS

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan..

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2024 – 2026; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2027 – 2028.



Gambar 3. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;

7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau *IT Service Management*);
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2027 - 2028 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas mulai tahun 2024 – 2028. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 – 2028 dapat dilihat di tabel 18.

6.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas (2024 – 2028)

Tabel 18. Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas (2024 – 2028)

Inisiatif Strategis No	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan						
			2024	2025	2026	2027	2028		
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas	1.1	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Gunung Mas	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfosantik		✓	✓	✓	✓
		1.2	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Gunung Mas	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfosantik		✓	✓	✓	
		1.3	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Gunung Mas	Bappedalitbang dan Dinas Kominfosantik		✓	✓	✓	
		1.4	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfosantik		✓	✓	✓	
		1.5	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓		
		1.6	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur	Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓		

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
			Keamanan Informasi Kabupaten Gunung Mas					
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	✓	✓		
3	Penguatan Kebijakan SPBE	3.1	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfosantik	✓		✓	
		3.2	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Bagian Organisasi, Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓	
		3.3	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Bappedalitbang, Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓	
		3.4	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum		✓		✓
		3.5	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓	

Inisiatif Strategis No	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
			2024	2025	2026	2027	2028	
	3.6	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran TIK	Bappedalitbang, BKAD, Dinas Kominfosantik, dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.7	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.8	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.9	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.10	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.11	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.12	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum	✓		✓		

Inisiatif Strategis No	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
			2024	2025	2026	2027	2028	
	3.13	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum		✓		✓	
	3.14	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Dinas Kominfosantik, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum		✓		✓	
	3.15	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	Bagian Organisasi, Dinas Kominfosantik, dan Bagian Hukum		✓		✓	
	3.16	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian	BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.17	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran	Bappedalitbang, BKAD dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.18	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah	BKAD dan Bagian Hukum	✓		✓		
	3.19	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan manajemen kinerja	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	✓		✓		

Inisiatif Strategis No	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan						
			2024	2025	2026	2027	2028		
	3.20	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Kominfosantik, dan Bagian Hukum	✓		✓			
	3.21	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik	Dinas Kominfosantik, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓		✓			
	3.22	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi	Bagian Hukum	✓		✓			
	3.23	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing system</i>	Inspektorat Daerah, Dinas Kominfosantik, dan Bagian Hukum	✓		✓			
	3.24	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah	Dinas Kominfosantik, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓		✓			
4	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE	4.1	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
		4.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
		4.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
		4.4	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
		4.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6	Evaluasi dan optimalisasi Manajemen Layanan	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓
		4.7	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
		4.8	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE	Dinas Kominfoantik dan BKPSDM	✓	✓	✓	✓	✓
		4.9	Audit TIK Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfoantik	✓		✓		✓
5	Survey Pengguna SPBE	5.1	Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan	Dinas Kominfoantik, Bagian Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	6.1	Adanya pengembangan integrasi proses bisnis pelayanan publik Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfoantik dan OPD terkait		✓	✓		
		6.2	Adanya pengembangan portal pelayanan publik Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfoantik		✓	✓	✓	✓
		6.3	Adanya pengembangan portal informasi mendukung ekosistem <i>Smart Agro</i> , <i>Smart Human Resources</i> , dan <i>Smart Tourism</i>	Dinas Kominfoantik, Dinas Pertanian, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	7.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Bappedalitbang, BKAD, Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
		7.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
		7.3	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dokumen persuratan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓		
		7.4	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓	✓	✓
		7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	8.1	Adanya portal pusat layanan internal (<i>service desk</i>) terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Dinas Kominfosantik		✓	✓		
9	Pengembangan Pusat Data	9.1	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan	Dinas Kominfosantik		✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
			yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i>						
10	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas	10.1	Adanya pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dan UPT	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
		10.2	Adanya pengembangan infrastruktur TIK pendukung <i>Smart Agro, Smart Human Resources</i> dan <i>Smart Tourism</i>	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	11.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Kominfoantik dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓	✓
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Gunung Mas	12.1	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai	13.1	Tersedianya layanan Cloud untuk Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pembangunan Portal Data Daerah	14.1	Adanya pengembangan Portal Data Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfoantik dan Bappedalitbang	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	15.1	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi	Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓	✓	✓
		15.2	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Dinas Kominfosantik	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	16.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Dinas Kominfosantik dan OPD terkait					✓
		16.2	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Dinas Kominfosantik dan OPD terkait					✓
17	Promosi Literasi SPBE	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	BKPSDM dan Dinas Kominfosantik Bidang Komunikasi	✓	✓	✓	✓	✓
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	18.1	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	BKPSDM dan Sekretariat Dinas Kominfosantik		✓	✓	✓	

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
		18.2	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKPSDM dan Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah	19.1	Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfoantik	✓	✓	✓	✓	✓

6.2. Percepatan Penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas

Moratorium pembangunan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum dilakukan agar masing-masing instansi pemerintah tidak membangun aplikasi sendiri-sendiri yang berdampak pada pemborosan anggaran yang akan mengakibatkan terjadinya in-efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dan dukungan seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Percepatan SPBE diwujudkan melalui penerapan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE. Dalam penerapan aplikasi umum, akan dilakukan melalui empat *quick wins* SPBE, antara lain integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, integrasi layanan kepegawaian, integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan layanan publik.

Sementara, pada infrastruktur SPBE terdapat dua fokus, yaitu pembangunan pusat data dan jaringan intra-pemerintah. Infrastruktur SPBE ini diperlukan untuk mendukung atau mendorong keempat integrasi aplikasi umum.

PROGRAM PERCEPATAN SPBE



Gambar 4. Program Percepatan SPBE

BAB VII

DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Gunung Mas yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2025 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 300.000.000,-
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis • Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>) • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis • Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Bisnis • Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB

	<p>19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal. • Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik. • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi.
--	---

Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikani Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2025 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 200.000.000,- untuk penyusunan awal, Rp 20.000.000 per tahun untuk evaluasi dan pengembangan arsitektur layanan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan • Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Gunung Mas • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Gunung Mas • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE. • Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.

Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Bappedalitbang dan Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 200.000.000,- untuk penyusunan awal, Rp 20.000.000 per tahun untuk evaluasi dan pengembangan arsitektur data
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Data • Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Gunung Mas • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Gunung Mas • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur data • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data. • Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.

Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2025 - 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 200.000.000,- untuk penyusunan awal, Rp 20.000.000 per tahun untuk evaluasi dan pengembangan arsitektur aplikasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi • Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Gunung Mas • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Gunung Mas • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur aplikasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi. • Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.

Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 200.000.000,- untuk penyusunan awal, Rp 20.000.000 per tahun untuk evaluasi dan pengembangan arsitektur infrastruktur
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur • Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Gunung Mas • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur infrastruktur • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur. • Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik Bidang Komunikasi
Anggaran	Rp 200.000.000,- untuk penyusunan awal, Rp 20.000.000 per tahun untuk evaluasi dan pengembangan arsitektur infrastruktur
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi • Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Gunung Mas • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi. • Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	2.1
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Setda/Bagian Organisasi
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE • Menentukan Tupoksi Tim • Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE • Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut • Menerbitkan SK Tim SPBE • Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE • Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE • Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi • Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE • FGD revidi dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja • Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar • Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah • Notulensi/catatan/laporan revidi atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	3.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revidu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD revidu dan evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunung Mas
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE yang sudah disahkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE

Program 3.2. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Kode Program	3.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SBPE.

Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data

Kode Program	3.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bappedalitbang, Dinas Kominfoantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum melingkupi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi. Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data

Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD

Kode Program	3.4
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2025, 2027
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah tujuan alur kerja terintegrasi, proses apa saja yang akan diintegrasikan, dan stakeholder yang terlibat • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan alur kerja terintegrasi antar OPD
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait alur kerja terintegrasi antar OPD telah ditetapkan yang mengatur secara lengkap alur integrasi SPBE sesama OPD • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait alur kerja terintegrasi antar OPD

Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE

Kode Program	3.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE

Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK

Kode Program	3.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bappedalitbang, BKAD, Dinas Kominfoantik, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran TIK, analisis risiko investasi TIK serta penanggung jawab pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait Perencanaan dan Penganggaran TIK yang sudah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran TIK

Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data

Kode Program	3.7
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menetapkan Standar Tingkatan/Rating Pusat Data • Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data • Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional • Membuat SOP Pusat Data • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Pusat Data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan • Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data

Program 3.8. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Kode Program	3.8
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra • Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan • Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra

Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kode Program	3.9
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi lain • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan. • Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.

Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi

Kode Program	3.10
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi

Program 3.11. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	3.11
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengatur secara lengkap ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.

Program 3.12. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK

Kode Program	3.12
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan) • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Audit TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan). • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK • Notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal • Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan

Program 3.13. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi

Kode Program	3.13
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2025,2027
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait integrasi sistem aplikasi yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait integrasi sistem aplikasi

Program 3.14. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Kode Program	3.14
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2025,2027
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan ruang lingkup aplikasi umum berbagi pakai, tatakelola dan teknologi pendukung, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai

Program 3.15. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik

Kode Program	3.15
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2025,2027
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revidi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan disusun, seperti tujuan penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik, jaminan keamanan dan keabsahan dokumen (<i>Confidentiality, Integrity, dan Availability</i>), tata kelola dan teknologi pendukung serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD revidi dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait Sistem Naskah Dinas Elektronik yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait sistem naskah dinas elektronik

Program 3.16. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian

Kode Program	3.16
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem manajemen kepegawaian
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	BKPSDMD, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti ruang lingkup sistem manajemen kepegawaian (perencanaan dan pengembangan PNS, administrasi kepegawaian, pengawasan pengendalian, dokumen kepegawaian), tata kelola serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan social • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait sistem manajemen kepegawaian yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait sistem manajemen kepegawaian

Program 3.17. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Kode Program	3.17
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bappedalitbang, BKAD dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan manajemen perencanaan dan penganggaran, pokok-pokok penyusunan rencana kerja dan anggaran, tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait manajemen perencanaan dan penganggarans yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen perencanaan dan penganggaran

Program 3.18. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah

Kode Program	3.18
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024,2026
Penanggungjawab	BKAD dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revidu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan sistem manajemen keuangan daerah, pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, ruang lingkup pendapatan daerah, ruang lingkup belanja daerah, tata cara penyusunan rancangan anggaran, serta tata cara pelaporan dan evaluasi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD revidu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Manajemen Keuangan Daerah
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait sistem manajemen keuangan daerah yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait sistem manajemen keuangan daerah

Program 3.19. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja

Kode Program	3.19
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan manajemen kinerja
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan fungsi layanan manajemen kinerja, ukuran dan indikator kinerja, tata cara dan tahapan manajemen kinerja, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait layanan manajemen kinerja yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan manajemen kinerja

Program 3.20. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan

Kode Program	3.20
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang sistem layanan pengadaan
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024,2026
Penanggungjawab	Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Kominfoantik, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi, ruang lingkup layanan, tata kerja dan standar pelayanan pengadaan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait sistem layanan pengadaan yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait sistem layanan pengadaan

Program 3.21. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik

Kode Program	3.21
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi dan ruang lingkup pengaduan, hak pengadu dan kewajiban pengelola, sarana pengaduan, pengelola layanan, prosedur penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi pengaduan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait sistem layanan pengaduan publik yang sudah disahkan • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait sistem layanan pengaduan publik

Program 3.22. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kode Program	3.22
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini fungsi, pengelolaan dan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Program 3.23. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan *Whistle Blowing System*

Kode Program	3.23
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing system</i>
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Inpektorat Daerah, Dinas Kominfosantik, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, ruang lingkup layanan <i>Whistle Blowing System</i>, pengelola dan yang menangani pengaduan, mekanisme pengaduan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing system</i>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait layanan <i>whistle blowing system</i> • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan <i>whistle blowing system</i>

Program 3.24. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah

Kode Program	3.24
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Anggaran	Rp 10.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti definisi, asas dan tujuan pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan (pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata), standar pelayanan, penyelenggara pelayanan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang layanan publik Pemerintah Daerah
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait layanan publik Pemerintah Daerah • Notulen rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan publik Pemerintah Daerah

Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE

Kode Program	4.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 300.000.000,- untuk melakukan asesmen Risiko SPBE, Rp 20.000.000,- per tahun untuk operasional dan evaluasi manajemen risiko setiap tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020 • Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE • Melakukan asesmen risiko SPBE • Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE • Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE • Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi • Melakukan evaluasi manajemen risiko
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti dokumen penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE. • Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan. • Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE • Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah • Notulensi/catatan hasil revidu dan evaluasi secara berkala • Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE • Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Kode Program	4.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- untuk pengembangan sistem, selanjut Rp 20.000.000,- untuk operasional manajemen data
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 • Menyusun arsitektur data • Menyusun desain dan model data • Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya • Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality</i>, <i>integrity</i> dan <i>availability</i> data • Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data • Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik • Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data) • Melakukan pengelolaan <i>data warehouse</i> dan <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan • Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata • Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku) • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020. • Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data • Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data • Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data • Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- untuk pembuatan sistem, Rp 20.000.000,- untuk operasional manajemen aset per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK) • Menyusun perencanaan aset TIK • Melakukan manajemen pengadaan aset TIK • Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK • Melakukan monitoring aset ITK • Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK • Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai • Membuat sistem informasi manajemen aset TIK • Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK • Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK • Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan. • Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK) • Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK • Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK • Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- untuk pengembangan sistem, Rp 20.000.000,- per tahun untuk operasional dan update data
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber • Menggunakan dan mengkesplorasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna • Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan • Berbagi pengetahuan dan wawasan • Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi • Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang • Membangun sistem manajemen pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>) dalam bentuk sistem informasi • Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan" Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya • Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan • Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan. • Aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo) • Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja • Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan • Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)

Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- untuk pengembangan sistem, Rp 20.000.000,- per tahun untuk operasional dan update data
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan • Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan • Menyusun perencanaan perubahan • Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan • Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan • Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan • Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus • Mengembangkan sistem manajemen perubahan • Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya • Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan. • Pedoman formal mengenai manajemen perubahan. • Aplikasi manajemen perubahan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo) • Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja • Dokumen revidan dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat revidan dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidan dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan • Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)

Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Kode Program	4.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas)
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Anggaran	Rp 100.000.000,- untuk pengembangan sistem, Rp 20.000.000 per tahun untuk pengembangan dan operasional manajemen layanan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dokumen kebijakan Manajemen Layanan SPBE • Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi) • Membuat SOP disetiap siklus nya dengan RACI (<i>Responsible, Accountable, Consult, Inform</i>) bagi personel yang mengampunya • Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala • Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi) • Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE • Penerapan SLA Layanan SPBE • Penerapan Manajemen Layanan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi • Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
Data Dukung Penilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya • Dokumen renja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE • Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan. • Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo). • Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan • Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video). • Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan • Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

Program 4.7. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	4.7
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE • Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI • Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan. • Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi • Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi • Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi • Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) • Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i> • Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas • Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (Information sensitivity policy, password policy, internal control policy, dsb), Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Proteksi Aset SPBE • Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal • Penetapan kebijakan strategis keamanan informasi kepada seluruh unit kerja • Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi • Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil reu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi • Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja

	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti penetapan/pengelesaian formal (permen/perban/pegub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen “Manual SMKI”). • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja. • Notulen/output atas evaluasi • Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi • Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi
--	---

Program 4.8. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE

Kode Program	4.8
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan BKPSDM
Anggaran	Rp 50.000.000,-
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan konsep penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE ▪ Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia) ▪ Menentukan <i>Job Role</i> dalam penyelenggaraan SPBE ▪ Menentukan kompetensi untuk <i>Job Role</i> Penyelenggara SPBE ▪ Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE ▪ Melaksanakan program pengembangan SDM SPBE (asesmen dan pelatihan) ▪ Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE ▪ Pengembangan SDM SPBE ▪ Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya ▪ Review dan evaluasi penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perencanaan/formasi SDM ▪ Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan ▪ Dokumen roadmap pelatihan ▪ Laporan pemenuhan/realisasinya ▪ Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.

Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	4.9
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024,2026,2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 200.000.000,- per audit
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur) • Membuat pedoman audit infrastruktur sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perban BSSN • Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel) • Melakukan audit • Menganalisa hasil audit • Membuat dokumen audit • Melakukan tindakan koreksi • Pelaksanaan audit TIK secara berkala
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. • Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). • Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal • Rujukan pedoman audit infrastruktur • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi • Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 50.000.000,-
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat metode survei (elektronik atau manual) • Menentukan kuesioner survei • Mengumpulkan data • Melakukan analisa data hasil survei • Menampilkan hasil survei

Program 6.1. Pengembangan Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik dan OPD terkait
Anggaran	Rp 100.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i> • Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal • Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.

Program 6.2. Pengembangan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	6.2
Nama Program	Pengembangan portal pelayanan publik Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 200.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk integrasi proses bisnis untuk layanan publik, baik secara kluster atau menyeluruh berdasarkan arsitektur aplikasi SPBE • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i> • Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik • Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal • Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.

Program 6.3. Pengembangan Portal Informasi Pendukung *Smart City* (Smart Agro, Smart Human Resource dan Smart Tourism)

Kode Program	6.2
Nama Program	Pengembangan Portal Informasi Pendukung <i>Smart City</i> (<i>Smart Agro, Smart Human Resource</i> dan <i>Smart Tourism</i>)
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Anggaran	Rp 100.000.000,- untuk pembuatan portal informasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan dan desain portal informasi <i>Smart City</i> (<i>Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism</i>) • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi yang terkait portal informasi <i>Smart City</i> • Membangun portal informasi <i>Smart City</i> • Melakukan update data dan informasi ke dalam portal dengan penanggungjawab OPD terkait : Dinas Pertanian, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan aplikasi portal informasi <i>Smart City</i> yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal • Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan aplikasi portal informasi <i>Smart City</i> antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.

Program 7.1. Pengembangan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)

Kode Program	7.1
Nama Program	Pengembangan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bappedalitbang, BKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 50.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV) • Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses • Menggunakan sistem penghubung • Atau membangun single database untuk seluruh proses • Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan. • Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun otomatis. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro • Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada • Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan • Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah • Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian • Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2026
Penanggungjawab	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 100.000.000,-
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan undang undang arsip nasional • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas • Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik • Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian • Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Program 7.4. Pengembangan Integrasi Pengaduan Publik

Kode Program	7.4
Nama Program	Pengembangan integrasi Pengaduan Publik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 50.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi) • Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya) • Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai • Melakukan pencatatan (<i>log</i>) • Memonitor waktu respon • Tracking penyelesaian pengaduan • Eskalasi pengaduan dengan kriteria • Evaluasi pengaduan secara berkala • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.5. Pengembangan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Anggaran	Rp 100.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi • Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu • Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile • Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 8.2. Pembentukan portal pusat layanan Internal (*Service Desk*)

Kode Program	8.2
Nama Program	Pembentukan Portal Pusat Layanan Internal (<i>Service Desk</i>)
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2025, 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- untuk pembuatan sistem di awal, Rp 50.000.000,- untuk evaluasi dan pengembangan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru • Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management (ITSM) • Membuat SLA layanan • Menerapkan sistem <i>Service Desk</i> dengan prinsip <i>Single Point of Contact</i> • Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada • Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA

Program 9.1. Pengembangan Pusat Data Dengan Standar Internasional *Data Center*

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan Pusat Data Dengan Standar Internasional <i>Data Center</i>
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 10 Milyar,- atau gratis (menggunakan Pusat Data Nasional)
Rincian Kegiatan	<p>Menggunakan Pusat Data Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengajuan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN <p>Menggunakan Pusat Data (<i>Data Center</i>) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan asesmen <i>data center</i> berbasis TIA 942, untuk mengukur kelayakan rated internasional Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data. Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data. Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional. FGD review dan evaluasi layanan pusat data Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil revidi dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku". Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja Katalog layanan pusat data. Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data. Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat Data Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data

Program 10.1. Mengembangkan Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar OPD

Kode Program	10.1
Nama Program	Membentuk Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar OPD
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 5 Milyar
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian integrasi infrastruktur daerah, untuk menentukan teknologi yang tepat (FO, Metro, VPN atau Wireless) untuk OPD Kecamatan yang belum terhubung • Membentuk DED integrasi infrastruktur • Memastikan anggaran implementasi • Implementasi integrasi infrastruktur berbasis kajian dan DED yang ada • Pemeliharaan infrastruktur jaringan • Penyediaan fasilitas backup jaringan • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan • Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i> • Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain; • Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra • Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog layanan Jaringan Intra • Prosedur operasional layanan jaringan intra • Prosedur pemeliharaan dan • Katalog layanan Jaringan Intra • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra • Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra • Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra. • Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra • Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra • Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra

Program 10.2. Mengembangkan Infrastruktur TIK Pendukung *Smart Agro, Smart Human Resource dan Smart Tourism*

Kode Program	10.2
Nama Program	Mengembangkan Infrastruktur TIK Pendukung Smart Agro, Smart Human Resource dan Smart Tourism
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Disesuaikan dengan kebutuhan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian infrastruktur TIK publik yang dibutuhkan untuk pengembangan Smart Agro, Smart Human Resource, dan Smart Tourism • Membentuk DED infrastruktur TIK publik • Pemeliharaan infrastruktur TIK publik • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan • Evaluasi Kinerja dan Audit Infrastruktur TIK publik • Penyusunan revisi penyempurnaan infrastruktur TIK publik berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog layanan Infrastruktur TIK Publik • Prosedur operasional layanan infrastruktur TIK • Prosedur pemeliharaan • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan infrastruktur TIK publik • Log penggunaan layanan infrastruktur TIK publik • Notulensi review dan evaluasi layanan infrastruktur TIK publik • Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan infrastruktur TIK

Program 11.1. Membentuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kode Program	11.1
Nama Program	Membentuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik dan OPD Terkait
Anggaran	Rp 100.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan • Pembuatan dokumen desain API dan <i>microservices</i> • Memastikan kebijakan integrasi dipahami • Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan • Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan. • Melakukan pengembangan API dan <i>microservices</i> layanan • Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi • Notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan • Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi • Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Program 12.1. Penyediaan Bandwidth Yang Memadai Untuk Tiap OPD Dan Koneksi Internet di Masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet (<i>hotspot</i> internet) di masyarakat
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Gunung Mas
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Sesuai harga ISP untuk total bandwidth yang disewa
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD • Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan • Menambah titik-titik hotspot layanan internet gratis bagi masyarakat • Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i> • Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfoantik • Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>) • Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet

Program 13.1. Penyediaan Layanan *Cloud* untuk Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan Layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik
Anggaran	Rp 2 Milyar untuk biaya Infrastruktur Server Cloud beserta Redundant-nya
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk <i>data center</i> yang berbasis virtualisasi • Menetapkan jenis layanan <i>cloud</i> yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS) • Memilih teknologi <i>cloud</i> yang akan digunakan • Mensosialisasi adanya cloud lokal • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server • Penyediaan fasilitas backup server dengan <i>auto-backup realtime</i> dan <i>co-location</i> • Penyediaan File Server dengan NAS (<i>Network Attached Storage</i>) untuk OPD

Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfoantik dan Bappedalitbang
Anggaran	Rp 300.000.000,- untuk membangun sistem awal, Rp 50.000.000,- pertahun untuk evaluasi, pengembangan dan sosialisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sumber data • Menentukan Struktur data • Menentukan metadata • Menerapkan <i>Data Security</i> • Membangun Aplikasi Sistem Portal Data • Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presided Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data • Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD • Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku) • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020. • Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data • Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data • Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 15.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi

Kode Program	15.1
Nama Program	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan <i>Defense In Depth</i> • Menerapkan teknologi perimeter (Firewall, IDS, IPS) • Menerapkan QoS (<i>Quality of Service</i>) untuk pengaturan <i>bandwidth</i> • Menerapkan <i>Update Patch</i> secara reguler pada PC dan Server • Menerapkan Enkripsi Data • Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi • Melakukan Pentest secara berkala • Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i> • Penerapan sistem SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>) • Penambahan IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) / IPS (<i>Intrusion Prevention System</i>) • Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>) • Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi

Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Kode Program	15.2
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 50.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menurunkan kebijakan dalam SOP harian • Monitor dan Evaluasi SOP • Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja • Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan tentang penerapan keamanan informasi yang sudah disahkan • Notulensi rapat • Dokumentasi kegiatan • Dokumen SOP yang sudah disahkan •

Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2027-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan OPD terkait
Anggaran	Rp 500.000.000,-
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data • Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data • Membangun sistem <i>big data</i> infrastruktur dan aplikasi) • Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, <i>social media</i>, audio) • Melakukan Ekstrasi Data • Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing</i> dan <i>filtering</i> • Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data

Program 16.2. Penerapan *Machine Learning* untuk analisa data menuju kecerdasan buatan

Kode Program	16.2
Nama Program	Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2027-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik dan OPD terkait
Anggaran	Rp 300.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan <i>machine learning</i> • Membangun sistem <i>big data</i> secara infrastruktur • Membangun sistem <i>data analytic</i> berbasis <i>machine learning</i>, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan • Menampilkan <i>data analytic</i> dalam sebuah <i>command center</i> • Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKPSDM dan Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 50.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP BNSP) • Menyusun topik materi sosialisasi SPBE • Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan • Melakukan sosialisasi • Melakukan evaluasi

Program 18.1. Pembentukan Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Kode Program	18.1
Nama Program	Pembentukan Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2025-2027
Penanggungjawab	BKPSDM dan Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 30.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional ▪ Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai

Program 18.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKPSDM dan Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 100.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada ▪ Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan <i>Internship</i> ▪ Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP) ▪ Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (<i>Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO</i>) - Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (<i>Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist</i>) - Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (<i>Web Developer, system Analyst, Database Administrator</i>) - Pelatihan SDM Big Data (<i>Big Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning</i>) - Pelatihan SDM Literasi Digital (<i>Digital Skill</i>) untuk seluruh ASN ▪ Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan ▪ Melakukan uji sertifikasi nasional
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM). ▪ Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK

Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfosantik
Anggaran	Rp 50.000.000,- per tahun
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi ▪ Penyusunan kebijakan kolaborasi ▪ Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha) ▪ Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu ▪ Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam <i>output</i> pada layanan public terpadu dan layanan Adpem terpadu ▪ Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut ▪ Pembuatan SOP Kolaborasi SPBE antar unit kerja, Pembuatan Laporan Kegiatan kolaborasi antar unit kerja, Pembuatan laporan penggunaan kolaborasi tiap unit kerja ▪ Penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan seluruh perwakilan unit kerja. ▪ Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notulensi/catatan/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE ▪ Bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE ▪ Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Instansi dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPBE ▪ Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE ▪ Notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE ▪ Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi untuk Kolaborasi SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja ▪ Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Kolaborasi SPBE terpadu, serta revidu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE ▪ Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE ▪ Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 – 2028 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Gunung Mas sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Gunung Mas, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Gunung Mas meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Gunung Mas meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Gunung Mas harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunung Mas dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gunung Mas selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Gunung Mas yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

